

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim)**

**Oleh**

**Ahmad Alfarabi**

Penelitian dilatarbelakangi oleh kebijakan KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 195 tahun 2022 tentang SIPOL sebagai aplikasi khusus untuk memverifikasi data partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan manfaat serta permasalahan dalam penggunaan SIPOL yang menjadi rekomendasi dari hasil evaluasi untuk diperbaiki sehingga output dari penggunaan SIPOL menjadi lebih terlegitimasi oleh peserta pemilu juga meminimalisir sengketa administrasi. Peneliti mengevaluasi SIPOL dari aspek administrasi, judicial dan politik serta 12 Prinsip penggunaan teknologi sistem informasi dalam pemilu. Metode penelitian menggunakan tipe kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi partisipatif menjadi data primer penelitian serta dokumentasi sebagai data sekunder. Analisis data diawali dengan mereduksi data lalu disederhanakan kemudian ditampilkan untuk ditarik kesimpulan sehingga data menjadi lebih jelas lalu divalidasi menggunakan teknik triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data temuan yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Aplikasi SIPOL mudah digunakan tapi permasalahan justru muncul pada lemahnya regulasi sehingga menyebabkan KPU Kabupaten Muara Enim menghadapi sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Aplikasi SIPOL juga masih perlu ditingkatkan pada aspek jaringan yang sering menyebabkan *server down* dan berdampak terhadap bertambahnya waktu dalam memverifikasi data partai politik.

**Kata Kunci:** SIPOL, Evaluasi Administrasi, Judicial, dan Politik.

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF POLITICAL PARTY INFORMATION SYSTEMS IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS**

***(Study at the General Election Commission of Muara Enim Regency)***

**By**

***Ahmad Alfarabi***

*The research is motivated by the KPU's policy of using the Political Party Information System (SIPOL) based on KPU RI Decree Number 195 of 2022 concerning SIPOL as a special application to verify data on political parties participating in the 2024 election. This research aims to determine the impact and benefits as well as problems in using SIPOL which is the recommendation from the evaluation results to be improved so that the output from using SIPOL becomes more legitimized by election participants as well as minimizing administrative disputes. Researchers evaluate SIPOL from administrative, judicial and political aspects as well as 12 principles of using information system technology in elections. The research method uses a descriptive qualitative type with data collection techniques, namely interviews and participatory observation as primary research data and documentation as secondary data. Data analysis begins with reducing the data and then simplifying it and then showing it to draw conclusions so that the data becomes clearer and then validating it using a method triangulation technique, namely an attempt to check the validity of the finding data which is carried out using more than one data collection technique to obtain the same data. The SIPOL application is easy to use but the problem arises from weak regulations, causing the Muara Enim Regency Election Commission to face administrative disputes at the South Sumatra Province Bawaslu. The SIPOL application also still needs to be improved on the network aspect which often causes server downtime and results in increased time for verifying political party data.*

**Keywords:** *SIPOL, Administrative Evaluation, Judicial, and Politics.*